



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

RENCANA KERJA TAHUN 2026

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO**





KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga **Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2026** telah dapat diselesaikan penyusunannya. Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2026, mempunyai arti strategis karena didalamnya memuat uraian program dan kegiatan, yang dirumuskan berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis diharapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar sebagai upaya mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan dimana semua kebijakan, program, sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Penyusunan **Rencana Kerja Tahun 2026** merupakan kewajiban bagi setiap Perangkat Daerah. **Rencana Kerja Tahun 2026** Badan Pendapatan Daerah disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, dan strategi seluruh aparat Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Mojokerto dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Badan Pendapatan Daerah. Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 memuat penjabaran program, kegiatan dan subkegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun tersebut.

Berhasil dan tidaknya target yang telah ditentukan dalam **Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2026** tidak terlepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat. *Rencana Kerja* yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan pada Tahun 2026 untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Selain itu juga dapat berguna bagi peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, 23 Juni 2025
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO

Drs. ARDI SEPDIANTO, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19700927 19910102002





BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Berkeadilan, Kompeten,
Integritas, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	14
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Dearah Kabupaten Mojokerto Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto	17
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto	52
2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	60
2.3.1 Pelayanan Badan Pendapatan Daerah	61
2.3.2. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Badan Pendapatan Daerah	64
2.3.3 Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap Capaian Program Nasional.....	65
2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan	67
2.3.5 Rekomendasi Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Proiritas Tahun 2026.....	70
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	70
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	83
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	85
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	85
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto	92

3.3 Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan	98
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	95
BAB V PENUTUP	104





DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024.....	2547
Tabel 2.2 Sasaran Strategi Badan Pendapatan Daerah	53
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Badan Penda[atan Daerah	94
Tabel 3.2 Rencana Target Pendapatan Asli Daerah APBD Tahun 2026 .	96
Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2026	97



**#bangga
melayani
bangsa**



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja Badan Pendapatan Daerah ini disusun dengan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya serta dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto memuat program, kegiatan dan subkegiatan, alokasi dan kelompok saran dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan tahapan penyusunan berupa persiapan penyusunan Renja; persiapan Rancangan Awal Renja Badan Pendapatan Daerah yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Badan Pendapatan Daerah tahun lalu dan evaluasi hasil Badan Pendapatan Daerah tahun berjalan; penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah; pembahasan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah; perumusan Rancangan Akhir Renja Badan Pendapatan Daerah; Verifikasi Rancangan Akhir Renja Badan Pendapatan Daerah.

Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2026 merupakan dokumen Perencanaan Kinerja Badan Pendapatan Daerah untuk tahun terakhir periode Renstra Badan Pendapatan Daerah 2021-2026 yang menjadi pedoman penyusunan Renja dan Anggaran Badan Pendapatan Dearah Tahun 2026 dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target Renstra dan RPJMD yang diselaraskan dengan pencapaian dan sasaran pembangunan nasional. Selain itu, penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto tahun 2025, Renstra Badan Pendapatan Daerah, Renja Kementerian Keuangan dan Renja Badan



Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Timur. Renja harus selaras dengan dokumen-dokumen perencanaan tersebut, utamanya yang berkaitan langsung dengan urusan Badan Pendapatan Daerah.

Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2026 dilakukan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto 2021-2026, dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 sehingga dalam melakukan perubahan berpedoman pada peraturan tersebut yang sudah melalui proses tahapan perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan **Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2026** berdasarkan pada beberapa peraturan sebagai landasan atau rujukan, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;



6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang



Organisasi Perangkat Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
20. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2010 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor



927);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 - 1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka



Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-2025;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 - 2032;
34. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto;
35. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 46 Tahun 2024 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 98 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto
36. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026
37. Keputusan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 188.45/280/HK/416-012/2023 Tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026
38. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor 188.40/



1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah adalah dokumen perencanaan untuk 1 (satu) tahun yang mengacu pada Renstra Badan Pendapatan Daerah dengan periode 5 (lima) tahun dengan maksud memberikan arah sekaligus sebagai acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan secara umum dilingkup Badan Pendapatan Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Maksud disusunnya *Rencana Kerja* Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto 2026 adalah untuk dijadikan dasar serta acuan bagi Penyusunan Program dan Kegiatan Tahunan, serta guna mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan *Rencana Kerja* Badan Pendapatan Daerah adalah:

1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 (satu) tahun yang tersusun dalam rencana.
2. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun oleh Badan Pendapatan Daerah.
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
4. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya



BerAKHLAK
Berakhlak, Berprestasi, Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan
Berakhlak, Berprestasi, Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan

**#bangga
melayani
bangsa**

serta dapat mengambil langkah-langkah/kebijakan sesuai dengan kewenangannya.

5. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika dokumen Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2026 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang Renja Perangkat Daerah serta keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah serta tindak lanjut proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang



BerAKHLAK
Berakhlak, Berprestasi, Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan
Berakhlak, Berprestasi, Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan

**#bangga
melayani
bangsa**

SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (Reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan sebagai landasan menyusun indikasi rencana program satu tahunan.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto.

Bab ini memuat kajian (Reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan



pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Sajian Tabel TC-29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Dearah Kabupaten Mojokerto.

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing- masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang- undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Sajian Tabel TC-30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto

Berisi uraian mengenai :

- Tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah ;
- Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisi uraian mengenai :

- Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;



b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda

Sajian Tabel TC-31 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;

Penjelasan penyesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok fungsi Perangkat Daerah.

Sajian Tabel TC-32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang perumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto

Berisi rumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan



fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto

Berisi penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain :

- a. Jumlah program dan jumlah kegiatan
- b. Lokasi program / kegiatan
- c. Total kebutuhan dana / pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

Sajian Tabel T.C-33 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan total kebutuhan dana / pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif.

BAB V PENUTUP



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan langkah penting dalam proses perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah, khususnya bagi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mojokerto sebagai ujung tombak penerimaan pendapatan asli daerah. Tahun 2024 menjadi tahun krusial, tidak hanya sebagai tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Bapenda periode 2021-2026, tetapi juga sebagai titik awal untuk menyiapkan perencanaan jangka menengah yang baru untuk periode 2025-2029. Oleh karena itu, evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024 perlu dilakukan secara komprehensif, dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi kinerja Bapenda.

Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan informasi objektif mengenai capaian kinerja Bapenda dalam melaksanakan program-program yang telah ditetapkan. Di satu sisi, hasil evaluasi ini akan mencerminkan sejauh mana Bapenda berhasil mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam Renja, serta efektivitas program yang dijalankan. Di sisi lain, evaluasi ini juga berfungsi untuk menilai tingkat kesiapan kelembagaan Bapenda dalam menghadapi perubahan dan tantangan yang mungkin muncul di masa depan, terutama menjelang pergantian Kepala Daerah pada awal tahun 2025.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah juga dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan rencana pembangunan sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan dan untuk bahan pertimbangan apakah program, kegiatan dan subkegiatan tersebut sudah



mencapai target sasaran sehingga tidak perlu lagi untuk direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan pada saat penyusunan perencanaan.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah tahun lalu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan Renja pada tahun tersebut. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah disusun berdasarkan analisis kondisi objektif permasalahan yang timbul. Dari permasalahan tersebut yang kemudian disusunlah suatu program, kegiatan dan subkegiatan pada tahun selanjutnya yakni Tahun 2026.

Sebagaimana termaktub dalam sistematika Renja Perangkat Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa perlu dilakukannya evaluasi pelaksanaan dan capaian Renja tahun lalu. Evaluasi terhadap Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program, kegiatan dan subkegiatan, pelaksanaan rencana program, kegiatan dan subkegiatan, dan hasil rencana program, kegiatan dan subkegiatan.

Dalam konteks ini, evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024 akan mencakup beberapa elemen penting:

1. Capaian Kinerja: Capaian kinerja Bapenda dalam tahun 2024 harus diukur berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam Renja. Hal ini mencakup realisasi pendapatan daerah, efektivitas pengumpulan pajak, serta pencapaian target-target lainnya. Data kuantitatif dan kualitatif perlu dianalisis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja Bapenda.



2. Efektivitas Program: Selanjutnya, evaluasi harus menilai seberapa efektif program-program yang telah dilaksanakan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Ini termasuk menilai relevansi program, dampaknya terhadap peningkatan pendapatan daerah, serta kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh Bapenda. Evaluasi ini juga perlu mempertimbangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan program.
3. Kesiapan Kelembagaan: Aspek penting lainnya adalah kesiapan kelembagaan Bapenda dalam menghadapi tantangan di masa mendatang. Evaluasi ini meliputi analisis struktur organisasi, kapasitas sumber daya manusia, serta sistem dan prosedur yang ada. Penting untuk memastikan bahwa Bapenda memiliki kemampuan yang memadai untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, terutama dalam menghadapi pergantian kepemimpinan.
4. Refleksi dan Pembelajaran: Evaluasi ini juga berfungsi sebagai refleksi akhir dari pelaksanaan Renstra periode 2021-2026. Dengan melihat kembali berbagai pencapaian dan tantangan yang dihadapi, Bapenda dapat mengambil pelajaran berharga untuk perencanaan ke depan. Proses refleksi ini penting untuk mengkalibrasi kembali arah pelaksanaan Renstra yang baru, agar dapat lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sehingga penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

1. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
2. Tujuan yang dikehendaki;



3. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
4. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto

Evaluasi atas pelaksanaan Renja Bapenda Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 sekaligus menjadi tinjauan atas pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Dengan kedudukan tersebut, evaluasi ini memiliki dua dimensi penting yaitu pertama, sebagai cermin dari efektivitas pelaksanaan program tahunan di tahun 2024 periode Renstra sebelumnya; dan kedua, sebagai dasar pertimbangan untuk merancang perbaikan kebijakan dan kelembagaan pada periode Renstra 2025-2029 yang telah dimulai sejak tahun 2025. Evaluasi ini tidak hanya bersifat retrospektif, tetapi juga strategis dan proyektif.

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 merupakan upaya signifikan untuk memperkuat kapasitas dan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah, khususnya dalam mendukung penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis capaian pelaksanaan Renja Bapenda melalui kerangka konvergensi fungsi kelembagaan, yang menyoroti peran penting Bapenda sebagai penopang utama dalam penerimaan PAD.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen dari pendapatan daerah. PAD adalah sumber pendapatan yang merupakan otoritas daerah dimana pelaksanaannya diorientasikan dan berbasis kepada potensi daerah. Oleh karenanya PAD sering



dijadikan parameter kemandirian otonomi suatu daerah dalam aspek kemampuan keuangan daerahnya. Peningkatan PAD pada dasarnya adalah merupakan upaya internal suatu daerah untuk memperkecil celah fiskal (*fiscal gap*). Dalam konteks ini, Pemerintah Kabupaten Mojokerto selalu berupaya menjadikan komponen PAD sebagai sumber dana yang selalu terus ditingkatkan penerimaannya guna lebih memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta menciptakan kemandirian daerah dalam pembiayaannya.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan pendapatan asli daerah, Bapenda memiliki peran strategis dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan PAD. Capaian dalam pelaksanaan Renja ini mencerminkan upaya Bapenda untuk mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada, sehingga dapat meningkatkan kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah.

Dalam rangka mencapai target-target yang ditetapkan dalam Renja, Bapenda mengeksekusi sejumlah program dan kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Melalui kampanye sosialisasi, edukasi, dan pelayanan yang lebih baik, Bapenda berupaya membangun hubungan yang lebih baik dengan wajib pajak. Capaian dari program-program ini dapat diukur dari peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar dan peningkatan realisasi penerimaan pajak, yang menunjukkan efektivitas strategi yang diterapkan.

Kerangka konvergensi fungsi kelembagaan dalam pelaksanaan Renja Bapenda mengacu pada sinergi antara berbagai fungsi dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Bapenda tidak hanya berfungsi sebagai pengumpul pajak, tetapi juga sebagai fasilitator dalam menciptakan ekosistem yang



mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Dalam hal ini, Bapenda menjalin kerjasama dengan berbagai sektor, baik di dalam pemerintahan maupun dengan sektor swasta, untuk menciptakan peluang yang lebih baik dalam pengelolaan PAD.

Pelaksanaan Renja juga mencakup penerapan inovasi dan teknologi dalam pengelolaan pendapatan asli daerah. Bapenda Kabupaten Mojokerto telah mengembangkan sistem informasi manajemen pengelolaan pajak daerah yang lebih modern, sehingga memudahkan pengawasan dan pelaporan. Penggunaan teknologi informasi tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan pendapatan, tetapi juga memberikan transparansi yang lebih besar kepada masyarakat terkait penggunaan dan pengelolaan PAD.

Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mojokerto menempatkan fokus utama pada pengembangan berbagai sumber pendapatan dari sektor pajak daerah. Pajak daerah merupakan salah satu komponen vital dalam struktur pendapatan daerah yang memberikan kontribusi signifikan terhadap kelangsungan dan keberlanjutan pembangunan daerah. Dengan demikian, Bapenda berkomitmen untuk mengoptimalkan pengelolaan pajak daerah agar dapat meningkatkan penerimaan yang akan digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintah.

Bapenda Kabupaten Mojokerto menyadari bahwa sektor pajak daerah memiliki potensi yang besar untuk digali dan dikembangkan. Oleh karena itu, berbagai strategi diterapkan, termasuk penguatan sistem administrasi perpajakan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pelaksanaan program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Melalui langkah-langkah ini, Bapenda berupaya menciptakan kesadaran dan



kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, sehingga target-target penerimaan pajak dapat tercapai dengan baik.

Sementara itu, di luar pengelolaan pajak daerah, sumber pendapatan lainnya seperti retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah dikelola oleh perangkat daerah penghasil lainnya. Retribusi, yang biasanya berasal dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah, seperti izin usaha, parkir, dan layanan publik lainnya, menjadi sumber pendapatan yang penting namun tidak dikelola oleh Bapenda. Perangkat daerah yang bertanggung jawab atas retribusi ini memiliki tugas untuk merumuskan kebijakan, menetapkan tarif, serta mengawasi pelaksanaannya.

Demikian pula, hasil pengelolaan kekayaan daerah, seperti aset-aset milik daerah yang dapat menghasilkan pendapatan, juga menjadi tanggung jawab perangkat daerah tertentu. Pengelolaan yang efektif terhadap kekayaan daerah ini sangat penting untuk memaksimalkan potensi pendapatan yang dapat diperoleh dan memastikan bahwa aset-aset tersebut memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Dalam kerangka ini, Bapenda dan perangkat daerah lainnya perlu bersinergi untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi peningkatan PAD secara keseluruhan. Kolaborasi antara Bapenda dan perangkat daerah penghasil lainnya dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan pendapatan sangat penting untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kapasitas keuangan daerah. Dengan saling mendukung dan berbagi informasi, diharapkan pengelolaan pendapatan dari berbagai sumber dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Secara keseluruhan, fokus Bapenda pada pengembangan sumber pendapatan dari sektor pajak daerah, sementara perangkat daerah penghasil lainnya mengelola retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah, menciptakan struktur pengelolaan



pendapatan yang terintegrasi. Model ini diharapkan tidak hanya meningkatkan PAD, tetapi juga memperkuat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Mojokerto, sehingga pemerintah daerah memiliki sumber daya yang cukup untuk membiayai pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

Capaian pelaksanaan Renja Bapenda Tahun 2024 juga melibatkan evaluasi berkelanjutan terhadap kinerja dan kapasitas kelembagaan. Bapenda secara rutin melakukan analisis terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, serta melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pegawai. Hal ini penting untuk memastikan bahwa Bapenda memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan siap menghadapi tantangan dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Capaian dalam pelaksanaan Renja Bapenda tidak hanya berdampak pada penerimaan PAD, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan daerah secara keseluruhan. Dengan meningkatnya PAD, pemerintah daerah memiliki lebih banyak sumber daya untuk membiayai program-program pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Ini pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Di sisi capaian Renstra 2021-2026, analisis difokuskan pada pencapaian sasaran utama Bapenda pada periode tersebut, yaitu Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Evaluasi ini tidak hanya menilai capaian angka indikator, tetapi juga mencermati keberfungsian sistem kelembagaan, pelaksanaan perencanaan, mekanisme pemantauan dan evaluasi, serta penguatan pelibatan pemangku kepentingan. Dengan memperhatikan keseluruhan konteks tersebut, bagian berikut dari subbab ini akan menguraikan hasil analisis terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024, baik dari sisi capaian indikator, efisiensi



pelaksanaan kegiatan, maupun efektivitas koordinasi kelembagaan. Hasil evaluasi ini akan dijadikan pijakan utama dalam menyusun rencana kerja Bapenda pada tahun 2026 secara lebih tajam, terfokus, dan berorientasi pada penguatan dampak pembangunan daerah.

A. Analisis Kinerja Tahun 2024

Pada tahun 2024 Bapenda Kabupaten Mojokerto melaksanakan sebanyak 2 (dua) program dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam P-APBD sejumlah Rp. 30.250.404.853,00 (*tiga puluh miliar dua ratus lima puluh juta empat ratus empat ribu delapan puluh lima rupiah*). Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp. 27.815.167.991,00 (*dua puluh tujuh miliar delapan ratus lima belas juta seratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah*) atau sebesar 91,95%.

Tahun 2024 menjadi momentum penting bagi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mojokerto dalam upaya meningkatkan kinerja pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam rangka mencapai target yang ditetapkan, Bapenda merumuskan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang terfokus dan terarah, dengan tujuan akhir mencapai kinerja keseluruhan sebesar 101,31% dari target yang direncanakan sebesar 100%.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Bapenda tahun 2024 menekankan beberapa aspek krusial dalam pelaksanaan program. Pertama, fokus utama dialokasikan pada penguatan administrasi perpajakan. Melalui peningkatan sistem pengumpulan dan pelaporan pajak, Bapenda bertujuan untuk memperbaiki efisiensi dalam proses pengelolaan pajak daerah. Ini mencakup penerapan teknologi informasi terbaru guna mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, serta meningkatkan transparansi



dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak.

Selain itu, program-program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat juga menjadi prioritas dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Dengan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan daerah, diharapkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak dapat meningkat secara signifikan.

Kedua, Bapenda juga berfokus pada pengembangan potensi sumber pendapatan pajak daerah utamanya adalah Pajak Bumi Bangunan dan Perkotaan Perdesaan, dan juga terutama dalam sektor retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Kolaborasi dengan perangkat daerah penghasil lainnya sangat penting untuk mengidentifikasi dan mengoptimalkan potensi pendapatan dari sumber-sumber tersebut. Sinergi ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi retribusi dan hasil kekayaan daerah terhadap PAD secara keseluruhan.

Ketiga, penetapan target yang realistis dan berbasis data menjadi landasan penting dalam merumuskan program dan kegiatan. Bapenda melakukan analisis mendalam terhadap potensi pendapatan yang ada serta melakukan evaluasi terhadap capaian di tahun sebelumnya untuk memastikan bahwa target yang ditetapkan dapat dicapai dengan efektif. Dengan pendekatan yang berbasis data, Bapenda dapat lebih responsif dalam mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada.

Keempat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Bapenda juga menjadi fokus utama. Melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai, Bapenda berusaha untuk memastikan bahwa seluruh tim memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Karyawan yang kompeten dan terampil akan berkontribusi langsung pada peningkatan kinerja



keseluruhan Bapenda.

Dengan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang terfokus pada empat aspek di atas, Bapenda Kabupaten Mojokerto optimis dapat mencapai kinerja sebesar 101,31% dari target yang direncanakan. Pencapaian ini bukan hanya akan meningkatkan PAD, tetapi juga mendukung program-program pembangunan daerah yang lebih luas, yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan komitmen yang kuat dan kerja keras dari seluruh elemen di Bapenda, diharapkan tahun 2024 akan menjadi tahun keberhasilan dalam pengelolaan pendapatan daerah yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Secara keseluruhan, capaian pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam meningkatkan penerimaan PAD melalui pendekatan konvergensi fungsi kelembagaan. Dengan fokus pada pengelolaan yang lebih efisien, kolaborasi lintas sektor, serta penerapan inovasi, Bapenda telah berhasil memperkuat perannya sebagai penopang utama dalam menerima pendapatan daerah. Keberhasilan ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi keuangan daerah, tetapi juga mendukung upaya pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Melihat ke depan, penting bagi Bapenda untuk terus beradaptasi dan mengembangkan strategi yang lebih inovatif dalam menghadapi tantangan yang akan datang.



Tabel T-C. 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Mojokerto

Kode	Urusan/ Bidang urusan pemerintahan Daerah/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5 02 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85	84,65	84,80	84,95	100,18%	85,20	85,80	100,94%



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

Kode	Urusan/ Bidang urusan pemerintahan Daerah/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)
5 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	100,00%			#DIV/0!			
5 02 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	3			#DIV/0!			
5 02 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	6			#DIV/0!			



Kode	Urusan/ Bidang urusan pemerintahan Daerah/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)
5 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90%	84,58%	90,00%	91,95%	102,17%	90,00%	92,00%	102,22%
5 02 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45	45	43	43	100,00%	50 orang	50	111,11%
5 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesional ASN	84	72,70	82	81,83	99,79%	82	82	97,62%
5 02 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					#DIV/0!			



Kode	Urusan/ Bidang urusan pemerintahan Daerah/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)
5 02 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4	0	0	0	#DIV/0!	2 orang	7	175,00%
5 02 01 2.05 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200				#DIV/0!	160 Orang	160	80,00%
5 02 01 2.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi	150	0	0	0	#DIV/0!	0	150	100,00%



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

Kode	Urusan/ Bidang urusan pemerintahan Daerah/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)
		Peraturan Perundang-Undangan								
5 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		0,00%
5 02 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	6	3	3	100,00%	3	3	50,00%



Kode	Urusan/ Bidang urusan pemerintahan Daerah/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)
5 02 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	3	0	0	#DIV/0!	3	3	100,00%
5 02 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	96	96	38	38	100,00%	96 Paket	96	100,00%
5 02 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	2	2	100,00%	2 Paket	2	100,00%
5 02 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12	12	12	12	100,00%	12 Dokumen	12	100,00%



Kode	Urusan/ Bidang urusan pemerintahan Daerah/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)
		yang Disediakan								
5 02 01 2.06 0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3	3	2	2	100,00%	2 Paket	1	33,33%
5 02 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	12	12	100,00%	12 Laporan	12	100,00%
5 02 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	12	12	12	12	100,00%	12 Laporan	12	100,00%



Kode	Urusan/ Bidang urusan pemerintahan Daerah/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)
		Konsultasi SKPD								
5 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang sudah dilaksanakan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		0,00%
5 02 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12	0	0	0	#DIV/0!	2 Unit	2	16,67%



Kode	Urusan/ Bidang urusan pemerintahan Daerah/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)
		yang Disediakan								
5 02 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	1	1	1	100,00%	2 Paket	1	20,00%
5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		0,00%
5 02 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	12	12	12	12	100,00%	12 Laporan	12	100,00%



Kode	Urusan/ Bidang urusan pemerintahan Daerah/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)
		Air dan Listrik yang Disediakan								
5 02 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	180	180	100,00%	12 Laporan	12	100,00%
5 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100,00%	99,67%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		0,00%



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

Kode	Urusan/ Bidang urusan pemerintahan Daerah/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)
		Daerah								
5 02 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100	102	110	110	100,00%	100 unit	128	128,00%



Kode	Urusan/ Bidang urusan pemerintahan Daerah/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)
5 02 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70	229	170	170	100,00%	215 Unit	115	164,29%
5 02 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	8	9	9	100,00%	1 Unit Gedung, 8 Baliho	6	600,00%
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Penerimaan PAD	100,00%	97,39%	100,00%	101,31%	101,31%	100,00%		0,00%



Kode	Urusan/ Bidang urusan pemerintahan Daerah/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)
5 02 04 2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Potensi PAD, Persentase Peningkatan Pajak Daerah, Persentase Penerimaan Pajak Daerah	3%; 4%; 100%	3%; 4%; 94,47%	3%; 4%; 100%	9,8%; 5,18%; 102,08%	326,67%; 129,50%; 102,08%	1%; 2%; 100%		#VALUE!
5 02 04 2.01 0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2	3	4	4	100,00%	3 Dokumen	3	150,00%



Kode	Urusan/ Bidang urusan pemerintahan Daerah/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)
5 02 04 2.01 0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2	6	2	2	100,00%	1 Unit	1	50,00%
5 02 04 2.01 0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12	28.339	23.500	28.802	122,56%	23.750	23.750	197916,67%



Kode	Urusan/ Bidang urusan pemerintahan Daerah/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)
5 02 04 2.01 0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	1.200	151.529	13.000	14.708	113,14%	12.000 Objek Pajak	12.000	1000,00%
5 02 04 2.01 0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	11.000	11.853	11.000	24.680	224,36%	11.000 Layanan	11.000	100,00%
5 02 04 2.01 0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan	252	247	253	258	101,98%	243 Dokumen	243	96,43%



Kode	Urusan/ Bidang urusan pemerintahan Daerah/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)
		Penelitian dan Verifikasi								
5 02 04 2.01 0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	4	4	4	4	100,00%	4 Dokumen	4	100,00%
5 02 04 2.01 0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah					#DIV/0!			#DIV/0!



Kode	Urusan/ Bidang urusan pemerintahan Daerah/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)
5 02 04 2.01 0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	135	211	140	220	157,14%	140 Dokumen	140	103,70%
5 02 04 2.01 0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	2	2	2	2	100,00%	2 Laporan	2	100,00%



Kode	Urusan/ Bidang urusan pemerintahan Daerah/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)
5 02 04 2.01 0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	12	12	12	12	100,00%	12 Laporan	12	100,00%



B. Analisis Pelaksanaan Rencana Aksi Tahun 2024

Analisis pelaksanaan rencana aksi tahun 2024 untuk urusan pengelolaan pendapatan asli daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto menunjukkan beberapa poin penting terkait pelaksanaan subkegiatan, kegiatan, program per triwulan, dan realisasi anggaran.

1. Pelaksanaan Program dan Kegiatan per Triwulan

Pelaksanaan program dan kegiatan di Bapenda direncanakan secara triwulanan, yang memberikan fleksibilitas dalam penyesuaian dan evaluasi kinerja sebagai berikut :

- a. Triwulan I: Fokus utama pada sosialisasi dan edukasi perpajakan kepada masyarakat. Kegiatan di triwulan ini mencakup penyelenggaraan seminar dan workshop, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban pajak. Realisasi anggaran pada triwulan ini menunjukkan penggunaan dana yang efisien untuk kampanye edukasi, namun perlu diupayakan agar partisipasi masyarakat meningkat secara signifikan.
- b. Triwulan II: Di triwulan ini, Bapenda melaksanakan penguatan sistem administrasi perpajakan dengan implementasi teknologi informasi. Kegiatan ini mencakup pengembangan aplikasi perpajakan yang memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Realisasi anggaran di triwulan ini menunjukkan investasi yang signifikan dalam teknologi, yang diharapkan dapat memberikan dampak positif pada efisiensi pengumpulan pajak.
- c. Triwulan III: Pada triwulan ini, kegiatan fokus pada evaluasi dan pengawasan terhadap realisasi pajak dan retribusi. Bapenda melakukan audit dan monitoring terhadap wajib pajak untuk memastikan kepatuhan. Realisasi anggaran pada



triwulan ini lebih tinggi dikarenakan adanya biaya tambahan untuk audit, namun hasilnya memberikan data yang lebih akurat untuk perencanaan di triwulan berikutnya.

- d. Triwulan IV: Menjelang akhir tahun, Bapenda berfokus pada evaluasi keseluruhan kinerja dan penyusunan laporan pertanggungjawaban. Kegiatan di triwulan ini juga mencakup penyesuaian target untuk tahun berikutnya berdasarkan data yang diperoleh dari triwulan sebelumnya. Realisasi anggaran pada triwulan ini terlihat mengarah pada penyusunan laporan dan evaluasi, yang penting untuk perbaikan di tahun mendatang.

2. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran di Bapenda selama tahun 2024 menunjukkan pengelolaan yang cukup baik, dengan alokasi dana yang sesuai dengan kebutuhan setiap program dan kegiatan. Namun, terdapat beberapa area yang perlu perhatian lebih, seperti:

- a. Efisiensi Penggunaan Anggaran: Meskipun realisasi anggaran menunjukkan penggunaan yang baik, terdapat peluang untuk meningkatkan efisiensi dalam beberapa kegiatan, terutama dalam sosialisasi dan kampanye edukasi. Penggunaan media digital sebagai alternatif untuk penghematan biaya dapat dipertimbangkan.
- b. Penyesuaian Anggaran: Diperlukan fleksibilitas dalam penyesuaian anggaran berdasarkan hasil evaluasi triwulanan. Jika suatu program menunjukkan hasil yang kurang optimal, alokasi dana dapat dialihkan untuk mendukung program lain yang lebih efektif.
- c. Pelaporan dan Transparansi: Penting untuk memastikan bahwa pelaporan penggunaan anggaran dilakukan secara transparan dan akuntabel. Ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja Bapenda dalam



pengelolaan PAD.

Dalam rangka mencapai target kinerja sasaran yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Bapenda maka perlu didukung anggaran program tahun 2024 dengan total alokasi belanja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto sebesar Rp. 30.250.404.853, 00 (*Tiga puluh milyar dua ratus lima puluh juta empat ratus empat ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja operasi sebesar Rp. 29.666.320.443, 00; dan
2. Belanja modal sebesar Rp. 584.084.410, 00

Yang dijabarkan dalam realisasi anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2024 sebagai berikut :



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan - Akuntabel - Kompeten - Harmonis - Loyal - Adaptif - Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

Tabel 2.1

**Realisasi Program dan Kegiatan Bapenda
Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024**

No	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	24.347.151.778,00	22.454.966.315,00	92,94
A	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.386.373.579,00	18.739.291.178,00	91,92
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.386.373.579,00	18.739.291.178,00	91,92
B	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.155.490.609,00	1.992.359.939,00,00	90,51
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	484.424.550,00	481.920.200,00,00	99,48
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	433.249.997,00	382.579.750,00,00	88,30
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	569.321.200,00	523.992.975,00,00	92,04
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	115.954.800,00	99.870.600,00,00	86,13
5	Penyediaan Bahan/Material	299.374.680,00	292.044.700,00,00	97,55



BerAKHLAK
BerAKHLAK
BerAKHLAK

**#bangga
melayani
bangsa**

No	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	37.924.000,00	32.957.900,00	86,91
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	215.241.382,00	178.993.814,00	83,16
C	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.960.360,00	3.960.000,00	99,99
1	Pengadaan Mebel	3.960.360,00	3.960.000,00	99,99
D	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	469.002.720,00	451.262.246,00	95,18
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	161.642.400,00	148.469.441,00	91,85
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	307.360.320,00	302.792.805,00	98,51
E	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.332.324.510,00	1.332.324.510,00	100,00
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	424.662.150,00	366.363.452,00	86,27
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	106.977.250,00	106.643.725,00	99,69
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	800.685.110,00	795.085.775,00	99,30
II	Program Pengelolaan pendapatan Daerah	5.903.253.075,00	5.903.253.075,00	



BerAKHLAK
Berakhlak Melayani Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaborasi

**#bangga
melayani
bangsa**

No	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
D	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	5.903.253.075,00	5.360.201.676,00	83,88
1	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	152.190.000,00	113.843.032,00	74,80
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	450.560.500,00	449.677.017,00	99,80
3	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1.054.035.550,00	916.413.797,00	86,94
4	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	345.714.050,00	341.300.000,00	98,72
5	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	327.502.900,00	158.838.000,00	48,50
6	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	63.000.000,00	63.000.000,00	100
7	Penagihan Pajak Daerah	3.180.731.825,00	3.024.075.888,00	95,07
8	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	134.502.000,00	131.551.244,00	97,81
9	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	48.400.000,00	19.500.000,00	40,29
10	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	146.616.250,00	142.002.698,00	96,25



3. Evaluasi dan Pengendalian

Dalam rangka memastikan bahwa pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan, dan anggaran di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mojokerto berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Bapenda menerapkan berbagai langkah evaluasi dan pengendalian yang sistematis dan terstruktur. Berikut adalah beberapa tindakan yang telah dilakukan oleh Bapenda dalam proses tersebut:

1. Perencanaan yang Matang

Sebelum pelaksanaan program dan kegiatan, Bapenda melakukan perencanaan yang komprehensif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Proses ini mencakup analisis situasi dan identifikasi kebutuhan yang mendasari setiap program dan kegiatan yang direncanakan. Dengan perencanaan yang matang, Bapenda dapat menetapkan target yang realistis dan menciptakan indikator kinerja yang jelas untuk masing-masing program.

2. Penyusunan Indikator Kinerja

Bapenda menetapkan indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (SMART) untuk setiap program dan kegiatan. Indikator ini berfungsi sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan program. Dengan adanya indikator yang jelas, Bapenda dapat secara rutin memantau kemajuan dan mengidentifikasi potensi masalah sejak awal.

3. Monitoring dan Evaluasi Berkala

Bapenda melaksanakan monitoring dan evaluasi (Monev) secara berkala, baik bulanan maupun triwulanan. Kegiatan monev ini mencakup pengumpulan data dan informasi tentang pelaksanaan program dan penggunaan anggaran. Tim evaluasi Bapenda secara rutin melakukan kunjungan lapangan untuk memastikan bahwa



kegiatan berjalan sesuai rencana dan untuk melakukan penyesuaian jika diperlukan. Hasil evaluasi ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait program yang sedang berjalan.

4. Pelaporan dan Transparansi

Bapenda menerapkan sistem pelaporan yang transparan dalam pengelolaan program dan anggaran. Setiap hasil evaluasi dan monev dilaporkan secara terbuka kepada pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat. Pelaporan yang transparan ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas Bapenda, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan pendapatan daerah.

5. Pengendalian Anggaran

Bapenda melakukan pengendalian anggaran dengan ketat untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Setiap pengeluaran anggaran harus melalui proses persetujuan dan pengawasan yang jelas. Bapenda juga melakukan analisis terhadap setiap realisasi anggaran untuk mengidentifikasi penyimpangan dan mengambil langkah-langkah korektif jika diperlukan.

6. Feedback dan Perbaikan Berkelanjutan

Bapenda mengadopsi pendekatan perbaikan berkelanjutan dengan mengumpulkan umpan balik dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan stakeholder terkait. Melalui mekanisme ini, Bapenda dapat memahami pandangan dan harapan masyarakat terhadap program yang dilaksanakan, serta mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Hasil umpan balik ini kemudian digunakan untuk menyempurnakan program dan kegiatan di masa mendatang.

7. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Temuan dari proses evaluasi tidak hanya didokumentasikan, tetapi juga ditindaklanjuti dengan langkah-langkah perbaikan.



Bapenda memastikan bahwa rekomendasi yang dihasilkan dari evaluasi diimplementasikan oleh pihak terkait, sehingga perbaikan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi, dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan bertujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.

Melalui langkah-langkah evaluasi dan pengendalian yang terstruktur, Bapenda Kabupaten Mojokerto berkomitmen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan, dan anggaran berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan pendekatan yang sistematis, transparan, dan partisipatif, Bapenda tidak hanya berupaya meningkatkan kinerja pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan, pelaksanaan Rencana Aksi Tahun 2024 untuk pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto menunjukkan kemajuan yang signifikan. Dengan struktur yang jelas dan fokus pada pelaksanaan program per triwulan, Bapenda mampu mengevaluasi dan menyesuaikan strategi dengan lebih efektif. Namun, tantangan dalam efisiensi penggunaan anggaran dan peningkatan partisipasi masyarakat tetap menjadi perhatian utama. Melalui analisis yang mendalam dan evaluasi berkelanjutan, Bapenda dapat terus meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan PAD, sehingga berkontribusi pada pembangunan daerah yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mojokerto.



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Kinerja pelayanan yang disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto dapat lebih terarah yang secara administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang telah disesuaikan. Dengan demikian perencanaan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan.

Capaian Kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto berdasarkan indikator kinerja pada RPJMD Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 2

Sasaran Strategi

Badan Pendapatan Daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	1,59%	9,60%	959,63%



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Berkeadilan, Berintegritas, Berharmoni, Layak, Adaptif, Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

Persentase peningkatan target pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun 2024 dengan target sebesar 1,59% tercapai sebesar 9,60% atau dengan capaian kinerja 959,63%.

Bersama ini disampaikan laporan realisasi penerimaan PAD sampai dengan Bulan Desember 2024 sebesar Rp. 719.708.723.154,97 atau (101,23%) dari target sebesar Rp. 710.974.249.945,00 adalah sebagai berikut :

1. Realisasi berdasarkan Per Kelompok Pendapatan

NO	URAIAN	2024		
		TARGET P-APBD	REALISASI	%
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	710.974.249.945,00	719.708.723.154,97	101,23%
I	PAJAK DAERAH	389.044.500.000,00	395.837.254.177,50	101,75%
II	RETRIBUSI DAERAH	306.387.556.951,00	305.824.994.903,91	99,82%
III	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	11.207.692.994,00	11.207.692.993,61	100,00%
IV	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	4.334.500.000,00	6.838.781.079,95	157,78%

Sumber Data : Hasil Rekonsiliasi Bapenda dengan BPKAD



BerAKHLAK
Berakhlak, Berprestasi, Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan
Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

2. Realisasi penerimaan berdasarkan per Perangkat Daerah Penghasil

NO	U R A I A N	2024		
		TARGET P-APBD	REALISASI	%
PENDAPATAN ASLI DAERAH		710.974.249.945,00	719.708.723.154,97	101,23%
1	DINAS PERTANIAN	792.875.000,00	670.795.900,00	84,60%
2	DINAS TENAGA KERJA	3.000.000.000,00	4.063.163.600,00	135,44%
3	BPKAD	4.222.500.000,00	5.393.725.172,95	127,74%
4	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3.187.000.000,00	4.298.388.549,00	134,87%
5	RSUD PROF DR SOEKANDAR	160.000.000.000,00	167.402.734.177,15	104,63%
6	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	110.000.000,00	110.663.150,00	100,60%
7	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	11.207.692.994,00	11.207.692.993,61	100,00%
8	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	0,00%
9	DINAS PENDIDIKAN	50.200.000,00	50.200.000,00	100,00%
10	DINAS KESEHATAN	47.837.870.000,00	46.481.536.658,36	97,16%
11	BADAN PENDAPATAN DAERAH	389.044.500.000,00	397.123.015.084,50	102,08%
12	RSUD RA BASOENI GEDEG	65.000.000.000,00	61.011.278.773,87	93,86%
13	DISPERINDAG	2.966.401.021,00	2.492.405.842,53	84,02%



NO	U R A I A N	2024		
		TARGET P-APBD	REALISASI	%
14	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	5.500.000.000,00	4.952.581.003,00	90,05%
15	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	14.023.000.000,00	7.555.989.000,00	53,88%
16	DINAS PU DAN PENATAAN RUANG	4.032.210.930,00	6.894.553.250,00	170,99%
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	-	0,00%

Sumber Data : Hasil Rekonsiliasi Bapenda dengan BPKAD

Di tahun 2024 terjadi kenaikan angka penerimaan retribusi daerah yang sangat signifikan dibandingkan dengan penerimaan tahun 2023 sebesar 882,89% sehingga mempengaruhi proporsi komponen pendapatan asli daerah yang semula di tahun 2023 sebesar 4,74% menjadi 42,49%. Perubahan Alokasi Pendapatan BLUD ke pendapatan retribusi karena adanya perubahan kebijakan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pendapatan BLUD yang sebelumnya dimasukkan dalam Lain-Lain PAD akan dialokasikan menjadi bagian dari penerimaan retribusi daerah. Dengan perubahan ini lebih mmeberi fleksibilitas pengelolaan BLUD untuk mengelola keuangannya, memungkinkan penerapan praktik bisnis yang sehat dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Walaupun terdapat kenaikan angka penerimaan retribusi daerah di tahun 2024 ini masih terdapat pada 7 (tujuh) perangkat daerah penghasil yang pencapaian targetnya mengalami penurunan yaitu :



1. Dinas Pertanian (-56,45%)
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (-28,12%)
3. Dinas Kesehatan (-3,19%)
4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan (-19,41%)
5. Dinas Komunikasi dan Informatika (-100,00%)
6. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah raga dan Pariwisata (-13,14%)
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (-19,892%)

Selain itu terdapat 6 (enam) perangkat daerah penghasil yang tidak mencapai target 100% dengan alasan sebagai berikut :

1. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (53,88%)
 - 1) Obyek wisata Wana Padusan dan Air Terjun Dlundung yang sebelumnya pencatatan menggunakan perhitungan bruto sekarang menjadi perhitungan netto.
 - 2) Adanya perbaikan jalan menuju Air Terjun Dlundung mulai tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan 21 Juli 2024, sehingga diterapkan system buka tutup jalan yang berimbas pada penurunan pengunjung.
 - 3) Perubahan harga tiket mancanegara yang sebelumnya di Perda lama Rp 50.000,00 menjadi Rp 7.000,00 di Perda baru.
 - 4) Penurunan pengunjung karena banyaknya competitor yang terus melakukan inovasi dan upgrade fasilitas yang ada pada obyek wisata yang dikelola, sedangkan fasilitas atau inovasi yang ada pada obyek wisata yang dikelola pemda masih belum maksimal karen anggaran untuk upgrade fasilitas belum maksimal.
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (84,02%)
 - 1) Tidak tercapainya realisasi retribusi pelayanan pasar



sesuai target karena :

- a. Banyaknya pedagang yang tutup karena kurangnya pembeli
- b. Kurangnya perawatan sarana dan prasarana pasar sehingga banyak kondisi fisik pasar yang rusak dan kurang layak
- c. Adanya pasar online yang menjual barang di bawah harga penjualan di pasar bahkan lebih rendah dari harga kulakan yang ada di pasar
- d. Banyaknya toko-toko besar/grosir di kampung-kampung yang menyebabkan konsumen yang datang ke pasar berkurang

2) Realisasi sewa Barang Milik Daerah (BMD) belum 100% karena :

- a. Penyewa tidak bisa melunasi sampai bulan Desember 2024
- b. Untuk Jotangan terbayar pada tanggal 2 Januari 2025
- c. Di PPST kios masih belum membayar sewa kios arena sepi.

3. Dinas Pertanian (84,60%)

- 1) Target tidak tercapai 100% karena adanya Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga pengujian produk hewan segar/beku yang semula rutin dilakukan setiap bulan menjadi 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Pengujian pada produk olahan bahan asal hewan berupa sosis, nugget, es krim dan susu olahan tidak dilakukan di Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner



tetapi menjadi tanggung jawab Badan POM RI.

4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan dan Pemukiman dan Perhubungan (90,05%)

Target tidak terealisasi karena adanya perubahan perjanjian kerja sama sehingga kehilangan potensi mulai tanggal 15 Maret 2024 s.d 18 Agustus 2024

5. RSUD RA. Basoeni (93,86%)

Target tidak terelaborasi karena :

- 1) Adanya perubahan prosedur pencairan klaim BPJS sehingga klaim bulan November 2024 yang sedianya cair di Bulan Desember 2024 menjadi terkendala dan cair di bulan Januari 2025.
- 2) Layanan Hemodialisis (HD) yang rencananya beroperasi di tahun 2024 karena adanya kendala perijinan sehingga baru terealisasi di bulan Januari 2025

6. Dinas Kesehatan (97,16%)

Target tidak tercapai karena :

- 1) Kapitasi adanya temuan audit BPK kepada BPJS, sehingga adanya pengurangan kapitasi yang dikompensasikan pada pendapatan kapitasi BLUD bulan Oktober, November dan Desember 2024.
- 2) Sedangkan Non Kapitasi adanya faskes klinik/rumah sakit di sekitar puskesmas dan untuk setoran umum hanya berlaku untuk Masyarakat yang bukan peserta BPJS.

Sedangkan pencapaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah sebagai organisasi perangkat daerah dalam urusan keuangan, disajikan dalam tabel berikut ini:



Tabel T-C. 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Mojokerto

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2027 (n+1)	Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2027 (n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pendapatan APBD	-	Rasio Pendap atan Asli Daerah	30%	30%	30%	30%	25,64%	30%	30%	30%	



2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah menghadapi isu penting sebagai berikut:

1. Optimalisasi potensi PAD melalui perluasan obyek dan subyek pajak yang belum tercatat atau sudah terdaftar sebagai wajib/obyek pajak sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang melalui peningkatan kualitas pelayanan, kualitas profesionalisme aparatur dan koordinasi antar dinas terkait;
2. Sosialisasi kepada seluruh masyarakat tentang arti pentingnya Pajak dan Retribusi Daerah dalam melaksanakan roda Pemerintahan dan Pembangunan Kabupaten Mojokerto. Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat maupun petugas pemungut yang diharapkan dapat menggugah kesadaran masyarakat akan arti pentingnya Pajak dan Retribusi Daerah dalam pelaksanaan roda pemerintahan dan pembangunan kabupaten Mojokerto.
3. Perbaikan sistem, prosedur dan tata kerja pemungutan PAD. Perbaikan sistem dan prosedur tata kerja pemungutan PAD yang mengatur tentang tata cara pemungutan dan penyetoran PAD bagi petugas pemungut.
4. Optimalisasi digitalisasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
5. Peningkatan kualitas pengawasan dan pelaporan yang baik akan berdampak langsung pada transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah
6. Evaluasi perda yang terus dilakukan disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang terbaru dengan melihat kondisi daerah dengan memperhatikan aspirasi/masukan dari berbagai elemen baik dari dinas terkait maupun dari masyarakat. untuk peningkatan sumber pendapatan daerah



dengan memanfaatkan kepedulian dan peran serta masyarakat atau wajib pajak dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah;

7. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah khususnya penerimaan pendapatan daerah.
8. Penyiapan Sumber Daya Manusia Pemungut PAD yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
9. Sinergitas program kegiatan antar perangkat daerah terutama perangkat daerah penghasil guna menciptakan daya ungkit penerimaan PAD.

2.3.1 Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

Bedasarkan Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis dibidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah;



4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di atas maka kinerja pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto difokuskan pada pelayanan Pendapatan Asli Daerah yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sebagai perangkat daerah dengan fungsi penunjang urusan bidang keuangan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto memiliki konsentrasi tugas pada pengelolaan PAD khususnya sektor Pajak Daerah. Optimalisasi penerimaan pajak daerah dilakukan dengan cara menjaga tingkat kepatuhan wajib pajak secara optimal, melalui kebijakan sebagai berikut:

1. Memberikan diskon/bebas denda bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak daerah. Pemberian diskon/bebas denda tersebut diharapkan mampu meningkatkan animo masyarakat untuk membayar piutang pajak daerah;
2. Menyesuaikan pola pendataan/penagihan objek Pajak Daerah dengan memanfaatkan database dan lebih menekankan interaksi melalui jaringan teknologi informasi dan komunikasi, daripada interaksi tatap muka langsung dengan wajib pajak;
3. Meningkatkan sosialisasi kebijakan pajak daerah, dengan titik berat model interaktif/rekaman/video di media radio, televisi, media online untuk diseminasi program/kebijakan pajak daerah;
4. Menambah mitra kerjasama penyelenggaraan pelayanan pembayaran Pajak Daerah, untuk meningkatkan radius jangkauan pelayanan.



Dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan khususnya dalam fungsi penunjang urusan bidang keuangan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto selalu berkoordinasi dan bersinergi program dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dengan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yaitu Persentase PAD terhadap Total Pendapatan selaras dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto yakni Rasio Pendapatan Asli Daerah dengan indikator Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pendapatan APBD.

Untuk lebih meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah khususnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto sesuai tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto yaitu Rasio Kemandirian Keuangan Daerah maka diperlukan koordinasi secara terus menerus dengan Kementerian Keuangan dalam peningkatan kualitas dan efektivitas transfer ke daerah dilakukan melalui kebijakan-kebijakan desentralisasi fiskal untuk mewujudkan hubungan keuangan pusat dan daerah yang adil dan transparan. Sistem hubungan keuangan yang lebih baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan mendorong pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah yang sejalan dengan target nasional tanpa mengesampingkan karakteristik masing-masing daerah sesuai amanat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Hal ini dimaksud khususnya terkait penyediaan dan pemenuhan pelayanan publik yang prima dan/atau lebih berkualitas sehingga dapat berimbas pada peningkatan perekonomian, daya saing, dan kesejahteraan masyarakat.



2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Badan Pendapatan Daerah

Beberapa permasalahan dan hambatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antara lain:

1. Masih kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Hal ini dikarenakan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Faktor ini menjadi salah satu pemicu wajib pajak untuk menunda, bahkan tidak membayarkan pajaknya. Selain itu kurangnya informasi penyuluhan/sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten kepada masyarakat;
2. Dari ketidaksadaran dan ketidakpatuhan wajib pajak mengakibatkan timbulnya piutang pajak daerah yang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hal tersebut dikarenakan bahwa hasil kegiatan pemeriksaan pajak belum dilakukan pembayaran pajak oleh wajib pajak;
3. Masih terdapat potensi PAD yang belum tergali secara optimal sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang harus terus ditingkatkan untuk menuju kemandirian ekonomi;
4. Kualitas dan kinerja Sumber Daya Manusia belum optimal;
5. Sarana dan Prasarana kerja perlu diremajakan dan ditingkatkan;
6. Terbatasnya dana/anggaran penunjang kegiatan;
7. Pembinaan dan pendayagunaan aparatur perlu ditingkatkan terutama dalam menyikapi perubahan peraturan pengelolaan keuangan yang dinamis.
8. Sinergitas antar perangkat daerah penghasil yang masih belum optimal.



2.3.3 Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala

Daerah, terhadap Capaian Program Nasional

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021–2026, ditetapkan visi pembangunan Kabupaten Mojokerto yaitu ***“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Lebih Maju, Adil dan Makmur”***

Dalam rangka pencapaian visi secara efektif dan efisien Bapenda mengusung misi ke-3, yaitu: “Membangun Kemandirian Ekonomi pada Semua Tingkatan, Koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat”

2.3.3.1 Dampak pada Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto, sebagai garda depan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan sub urusan pendapatan asli daerah memberikan kemudahan dalam rangka mendukung misi ke 3 (tiga) Kepala Daerah Kabupaten Mojokerto yaitu “Membangun Kemandirian Ekonomi pada Semua Tingkatan, Koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat”. Mengusung sasaran strategis “Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah” dengan indikator Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari target 1,59% di tahun 2024 tercapai 9,60% dengan pertumbuhan yang positif di penerimaan sektor pajak daerah dan retribusi daerah dan juga pengelolaan kekayaan daerah lainnya.

Tahun 2024 menjadi tahun yang penuh harapan dan pencapaian bagi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mojokerto, terutama dalam hal target pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan target awal yang ditetapkan sebesar 1,59%, Bapenda berhasil mencatatkan pencapaian yang luar biasa dengan pertumbuhan yang mencapai 9,60%. Angka ini tidak



hanya menunjukkan keberhasilan dalam pengelolaan PAD, tetapi juga mencerminkan upaya yang konsisten dan sinergis dari seluruh elemen pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Hal ini secara tidak langsung mempengaruhi pencapaian dari misi ke-3 (tiga) Kepala Daerah Kabupaten Mojokerto untuk mewujudkan kemandirian ekonomi yang dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto di tahun 2024 dengan target 30% hanya tercapai 25,64%.

2.3.3.2 Dampak pada Program Nasional/Internasional

Dalam hal dampak pada Program Nasional/Internasional sebagai berikut :

1. Dampak Program Nasional

- a. Belum Optimalnya kualitas pelayanan publik atas tuntutan masyarakat untuk perbaikan kualitas pelayanan.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto di tahun 2024 memperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 87,63 dengan kategori Sangat Baik. IKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

- b. Belum optimalnya sistem pengelolaan keuangan daerah;

2. Dampak Program Internasional (SDG's)

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto mengusung Pilar ke-17 yaitu Memperkuat Ukuran Implementasi dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan yang Berkelanjutan.



Dengan target “Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya”. Dengan indikator dan target sebagai berikut :

1. Rasio penerimaan PAD terhadap APBD ; 30%
2. Proporsi APBD yang didanai oleh PAD ; 25,64

Di tahun 2024 ke-5 (lima) indikator tersebut di atas masih belum memenuhi target yang ditetapkan.

Hal ini akan menjadikan evaluasi untuk tahun ke depannya menjadi lebih baik lagi.

2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan

Dalam meningkatkan pelayanan bidang keuangan sub urusan pendapatan asli daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto terdapat tantangan dan peluang. Adapun tantangan yang dihadapi antara lain:

1. Penyediaan Sumber Daya Manusia pemungut PAD yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
2. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah khususnya penerimaan pendapatan daerah
3. Penyusunan regulasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan regulasi yang berlaku
4. Sinergitas program kegiatan perangkat daerah guna menciptakan daya ungkit penerimaan PAD.

Sedangkan peluang yang ada, antara lain:

1. Masih terdapat potensi PAD yang belum tergali secara optimal sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang harus terus ditingkatkan;



2. Pelaksanaan koordinasi dengan dan antar Perangkat Daerah Penghasil;
3. Evaluasi Peraturan Daerah yang tidak sesuai dengan kondisi daerah dan Undang-undang/Peraturan Pemerintah/Peraturan yang terbaru/update untuk peningkatan sumber pendapatan daerah dengan memanfaatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah
4. Sosialisasi kepada seluruh masyarakat tentang arti pentingnya pajak dan retribusi daerah dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Mojokerto.
5. Pemberlakuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) pada pasal 4a ayat 2 bahwa Jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas :
 - 1) PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan)
 - 2) BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)
 - 3) PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu)
 - 4) PAT (Pajak Air Tanah)
 - 5) Pajak MBLB (Mineral Bukan LOGam dan Batuan)
 - 6) Pajak Sarang Burung Walet
 - 7) Opsen PKB
 - 8) Opsen BBNKB

Opsen PKB dan BBNKB merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat. Dengan opsen, pemerintah daerah dapat menyesuaikan tarif pajak sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan daerah masing-masing.



BerAKHLAK
Berakhlak, Berprestasi, Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan
Harmonis, Layak, Adaptif, Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

Peraturan opsen bertujuan untuk percepatan penerimaan bagi PKB dan BBNKB bagi kabupaten/kota dan sinergi pemungutan pajak antara provinsi dan kabupaten/kota dan tidak menambah beban Wajib Pajak. Di samping itu, opsen PKB dan BBNKB juga diyakini dapat mengurangi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) pada APBD provinsi. Pasalnya, penyebab tingginya SiLPA di provinsi selama ini sering dikarenakan keterlambatan pendistribusian dana bagi hasil (DBH). Dengan opsen, penerimaan PKB dan BBNKB langsung terbagi antara provinsi dan kabupaten/kota tanpa perlu ada lagi bagi hasil dari provinsi ke kabupaten/kota.

Dengan adanya beberapa penambahan kewenangan atas pemungutan pajak Daerah tersebut, sudah sepantasnya kita yang berada di jajaran Pemerintah Daerah khususnya Badan Pendapatan Daerah dapat lebih bersinergi dan berkolaborasi dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.

Sinergi dan kolaborasi dimaksud dapat diimplementasikan melalui pertukaran data dan informasi berkaitan dengan Pajak Daerah, sinergi pembiayaan, penugasan bersama personil untuk melakukan pendataan dan penagihan di lapangan maupun penyiapan sarana dan sarana pendukung pelaksanaan pemungutan pajak daerah. Mengingat pelaksanaan dimulainya secara efektif pemungutan jenis pajak Opsen PKB dan Opsen BBNKB pada tanggal 5 Januari tahun 2025 maka dalam Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah memasukkan tambahan anggaran untuk memenuhi kegiatan dimaksud.

6. Perbaiki system, prosedur dan tata kerja pemungutan pendapatan asli daerah.



2.3.5 Rekomendasi Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2026

Identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Untuk menghasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan harapan, maka strategi pemecahan masalah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Perhitungan dan perumusan target Pendapatan Asli Daerah tahun 2026 memperhatikan realisasi penerimaan Tahun 2024 yang disesuaikan dengan prediksi pertumbuhan potensi objek pajak daerah dan asumsi lainnya ditengah program pemulihan ekonomi nasional;
2. Penghitungan kebutuhan terhadap Belanja Pegawai, Modal dan Belanja Operasional berdasarkan prioritas yang diarahkan pada penyelenggaraan pelayanan mencakup penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan serta pemeliharaan sarana dan prasarana.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026. Rancangan awal RKPD Badan Pendapatan Daerah dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Urusan wajib Badan Pendapatan Daerah terdiri dari 2 (dua) program dan 7 (tujuh) kegiatan.



Tabel T-C. 31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD
tahun 2026 Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Mojokerto

No	RKPD RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	Nilai SAKIP OPD	85,30	26.754.445.775,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	Nilai SAKIP OPD	85,30	40.235.462.640	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90%	21.450.237.996,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90%	30.398.256.868	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Mojokerto	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/Bulan	21.450.237.996,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Mojokerto	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/Bulan	30.398.256.868	
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Indeks Profesionalisme ASN	82	167.736.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Indeks Profesionalisme ASN	82	963.592.000	



BerAKHLAK
BerAKHLAK adalah komitmen
berprestasi, melayani, jujur, disiplin, kompeten,
harmonis, loyal, adaptif, inovatif

**#bangga
melayani
bangsa**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	64.680.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Mojokerto	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	7 Orang	50.236.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Mojokerto	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4 Orang	578.912.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Mojokerto	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	160 Orang	17.500.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Mojokerto	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	160 Orang	20.000.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Mojokerto	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	60 Orang	100.000.000,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Mojokerto	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	50 Orang	300.000.000,00	
	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen		Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen		



No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	2.584.140.359,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	5.754.938.902	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	454.422.800,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	2.585.771.680	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	15.799.700,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	50.000.000,00	
	Pengadaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	96 Paket	693.301.200,00	Pengadaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	96 Paket	1.127.917.400	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	747435200	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	801.535.200	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	163.414.400,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	302.383.600	



BerAKHLAK
BerAKHLAK adalah komitmen seluruh aparatur sipil negara untuk meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan kinerja, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

**#bangga
melayani
bangsa**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Bahan Material	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	2 Paket	309.635.500,00	Penyediaan Bahan Material	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	2 Paket	421.656.390	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	22.433.250,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	60.433.250	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	177.698.309,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	405.241.382	
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Kab. Mojokerto	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100%	269.081.200,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Kab. Mojokerto	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100%	267.550.200	
	Pengadaan Kendaraan Dinas atau Jabatan	Kab. Mojokerto	Jumlah Unit Kendaraan Dinas atau Jabatan yang Disediakan	1 Unit		Pengadaan Kendaraan Dinas atau Jabatan	Kab. Mojokerto	Jumlah Unit Kendaraan Dinas atau Jabatan yang Disediakan	1 Unit		
	Pengadaan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Kab. Mojokerto	Jumlah Unit Kendaraan Operasional atau Lapangan	12 Unit	158.410.000,00	Pengadaan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Kab. Mojokerto	Jumlah Unit Kendaraan Operasional atau Lapangan	12 Unit	156.879.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Mebel	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	110671200	Pengadaan Mebel	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	110.671.200	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Mojokerto	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Mojokerto	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Mojokerto	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Mojokerto	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Mojokerto	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Mojokerto	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Mojokerto	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Mojokerto	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	916.272.960,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	916.281.360	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	639.801.600,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	639.810.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	276.471.360,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	276.471.360	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	100%	1.366.977.260,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	100%	1.934.843.310	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Mojokerto	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Mojokerto	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit		



BerAKHLAK
BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK
BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK

#bangga
melayani
bangsa

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Mojokerto	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	130 Unit	637.370.200,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Mojokerto	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	102 Unit	687.404.900	
	Pemeliharaan Mebel	Kab. Mojokerto	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit		Pemeliharaan Mebel	Kab. Mojokerto	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Mojokerto	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	200 Unit	128761900	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Mojokerto	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	215 Unit	194.365.650	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Mojokerto	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit 8 Bangunan	600.845.160,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Mojokerto	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit 8 Bangunan	1.053.072.760	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Mojokerto	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	9 Unit		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Mojokerto	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	9 Unit		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Mojokerto	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Mojokerto	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kab. Mojokerto	1. Porsentase Realisasi Penerimaan PAD 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 3. Jumlah Inovasi yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi serta Berkelanjutan	1. 100% 2. 87 3. 1 Inovasi	6.617.964.150,00	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kab. Mojokerto	1. Porsentase Realisasi Penerimaan PAD 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 3. Jumlah Inovasi yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi serta Berkelanjutan	1. 100% 2. 87 3. 1 Inovasi	8.507.342.000	
7	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kab. Mojokerto	1. Porsentase Basis Data Pajak Daerah yang Akurat	65%	6.617.964.150,00	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kab. Mojokerto	1. Porsentase Basis Data Pajak Daerah yang Akurat	65%	8.507.342.000	
			2. Porsentase Peningkatan Potensi PAD	3%				2. Porsentase Peningkatan Potensi PAD	3%		
			3. Porsentase Regulasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Sesuai	100%				3. Porsentase Regulasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Sesuai	100%		



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			4. Porsentase Sarana dan Prasarana Pajak Daerah yang Layak Fungsi dan Memadai	80%				4. Porsentase Sarana dan Prasarana Pajak Daerah yang Layak Fungsi dan Memadai	80%		
			5. Porsentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Daerah	75%				5. Porsentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Daerah	75%		
			6. Porsentase Realisasi Tunggakan Pajak Daerah	50%				6. Porsentase Realisasi Tunggakan Pajak Daerah	50%		
			7. Porsentase OPD Penghasil yang Melaksanakan Hasil Komitmen (Target Porsentase OPD Penghasil yang Melaksanakan Hasil Komitmen (Target)	65%				7. Porsentase OPD Penghasil yang Melaksanakan Hasil Komitmen (Target Porsentase OPD Penghasil yang Melaksanakan Hasil Komitmen (Target)	65%		



No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			8. Persentase Sistem Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Berbasis Online	80%				8. Persentase Sistem Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Berbasis Online	80%		
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen		Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah			
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	2 Dokumen	127.120.000,00	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	3 Dokumen	147.610.000	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Mojokerto	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Unit	431.495.000,00	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Mojokerto	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Unit	500.000.000	



No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah, Subyek Pajak Daerah dan Wajib Pajak Daerah	24.000 Laporan	797.956.300,00	Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah, Subyek Pajak Daerah dan Wajib Pajak Daerah	23.750 Laporan	962.000.000	
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan	Kab. Mojokerto	Jumlah Obyek Pajak yang Disesuaikan NJOPnya	12.000 OP	307.206.000,00	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan	Kab. Mojokerto	Jumlah Obyek Pajak yang Disesuaikan NJOPnya	12.000 OP	350.000.000	
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab. Mojokerto	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	11.000 Layan an	323.000.000,00	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab. Mojokerto	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12.000 Layan an	412.000.000	
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kab. Mojokerto	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	252 Dokumen	41.000.000,00	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kab. Mojokerto	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	243 Dokumen	55.750.000	
	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Penagihan Pajak Daerah	4 Doku men	2.550.495.750,00	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Penagihan Pajak Daerah	4 Doku men	3.854.000.000	



No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuahan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	150 Dokumen	175.385.000,00	Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	145 Dokumen	192.481.000	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	3 Laporan	1.681.983.400,00	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Laporan	1.743.121.000	
	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	12 Laporan	182.322.700,00	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	12 Laporan	290.380.000	
			JUMLAH		33.372.409.925,00			JUMLAH		48.742.804.640	



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto sebagai unsur perencana pembangunan daerah melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yaitu pelaksanaan Musrenbang secara berjenjang melalui Musrenbang Desa/Kelurahan, sampai Musrenbang Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Regional dan Nasional tetap melakukan upaya dalam rangka pelaksanaan pentahapan proses perencanaan pembangunan. Di dalam pelaksanaan Musrenbang tersebut dilakukan pengkajian usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah serta berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dan berdasarkan hasil pengamatan pelaksanaan Musrenbang kecamatan dengan tetap memperhatikan agenda prioritas pembangunan tahun 2026 yang tertuang di dalam RPJMD 2021-2026. Usulan dari pemangku kepentingan tersebut kemudian menjadi bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Usulan Program kegiatan masyarakat melalui Musrenbang mulai dari Musrenbang tingkat Kecamatan untuk tahun 2026 yang sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto diakomodir dalam program dan kegiatan Rencana Kerja, sebagai berikut:

Tabel T-C. 32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para
Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Mojokerto

Nama Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
NIHIL					



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 merupakan penjabaran Visi, Misi dan program Presiden dengan tetap perpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 – 2045. RPJMN menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota. Visi RPJMN 2025-2029 mengikuti Visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025 – 2029 yaitu **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**. Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar pondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya , sehingga berhasil mewujudkan Indoensia setara Negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

Arah kebijakan RPJMN dalam periode ini terdiri dari 8 Misi (Asta Cita) atau Prioritas Nasional, 17 Program Prioritas, 8 Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins) dan 320 Program Kerja. Sasaran Utama Pembangunan Nasional RPJMN 2025-2029 ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Presiden serta mendukung pencapaian sasaran RPJPN 2025–2045. Agar kinerja pembangunan menjadi terukur maka ditetapkan 5 (lima) Sasaran Utama Pembangunan Nasional, yaitu (1)Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju; (2)Kemiskinan Menurun dan ketimpangan Berkurang; (3)Kepemimpinan dan pengaruh di dunia Internasional Meningkat; (4)Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia; (5) Intensitas Emisi GRK menurun menuju *net zero emmision*.

Rancangan Awal RPJMN 2025-2029 di dalam Misi atau Prioritas Nasional ke-7 (tujuh) menyebutkan bahwa Memperkuat



Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat dan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan penyelundupan, di dalamnya terdapat Sub Prioritas Nasional yakni **Optimalisasi Penerimaan Negara** dengan Sasaran Utama *Tercapainya peningkatan pendapatan negara yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi*, dengan target :

1. Rasio Pendapatan Negara terhadap PDB (%);
Target di tahun 2025 sebesar 12,36 dan di akhir tahun 2029 sebesar 13,70 – 18,20.
2. Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB (%);
Target di tahun 2025 sebesar 10,24 dan di akhir tahun 2029 sebesar 11,49 – 15,01.

Isu, Tantangan dan Peluang untuk mewujudkan sasaran tersebut adalah Rendahnya penerimaan negara di Indonesia saat ini disebabkan masih terdapatnya kesenjangan mencakup aspek administrasi (*administration gap*) maupun kebijakan (*policy gap*) yang memerlukan transformasi tata kelola kelembagaan sebagai enabler untuk optimalisasi penerimaan negara, yang selama lima tahun terakhir tercermin dari rasio penerimaan perpajakan yang stagnan pada tingkat 9-10 persen terhadap PDB.

Untuk meraih target yang ditetapkan dengan menghadapi isu, tantangan dan peluang tersebut di atas maka disusun Kegiatan Prioritas Ektensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan Perpajakan yang merupakan implementasi dari Program Hasil Terbaik Cepat Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23% dengan indikator kegiatan *Tercapainya peningkatan basis pajak dan kepatuhan wajib pajak*, dan target yang ditetapkan :

- Persentase capaian basis pajak terhadap target yang ditetapkan sebesar 85 persen (2025) menjadi 90 persen (2029);



- Persentase capaian tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap target yang ditetapkan 85 persen (2025) menjadi 90 persen (2029);
- Tingkat efektifitas pemberian insentif perpajakan terhadap perekonomian.

Penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang sudah mulai disusun mulai bulan November 2023 dan sampai pada Rancangan Awal RPJMN 2025-2029 dilakukan untuk merencanakan pembangunan nasional dengan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) yang berfokus menyusun strategi pembangunan transformatif dan agenda pembangunan. Salah satu prioritas pembahasan raker adalah penajaman arah kebijakan kewilayahan dan dukungan sarana prasarana, sebagai respons atas hasil evaluasi yang menyatakan bahwa secara rata-rata, dua per tiga kebijakan daerah masih belum sesuai dengan perencanaan pusat. Sebagai upaya memastikan kesinambungan perencanaan dan pelaksanaan di wilayah serta dukungan sarana prasarana tersebut, Kementerian PPN/Bappenas menerapkan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional sebagai amanat dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional.

Kebijakan dan intervensi pembangunan wilayah serta penajaman pembangunan transformatif menjadi landasan bagi penyusunan RPJMN 2025-2029, dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi bagian penting dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045.

Sedangkan Tema Pembangunan dalam Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 adalah :

“Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif yang Berkelanjutan”.



Sedangkan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 adalah :

1. Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan social;
2. Perluasan lapangan kerja dan membangun keunggulan ekonomi;
3. Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor pendidikan dan kesehatan;
4. Keterpaduan pengembangan wilayah;
5. Pembangunan karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur dan berintegritas;
6. Pembangunan sektor pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan berbasis kerakyatan;
7. Pembangunan ekonomi kerakyatan dengan basis UMKM, koperasi, Bumdesa dan mendorong pemberdayaan pemerintahan desa;
8. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif dan anti korupsi;
9. Menjaga harmoni sosial dan alam dengan melestarikan kebudayaan dan lingkungan hidup.

Dalam Penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 mengacu pada kebijakan hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah.

Adapun Arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Mojokerto berdasarkan Tema Pembangunan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2026, adalah :

“Percepatan Transformasi Sosial Ekonomi dan Tata Kelola Pemerintahan Menuju Pusat Pemerintahan Baru yang Berkelanjutan”



Sedangkan Program Unggulan Misi 3 "Membangun kemandirian ekonomi pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat guna mewujudkan keluarga yang Sejahtera adalah sebagai berikut :

Program Priroitas

- a. Pelatihan kewirausahaan, akses pembiayaan bagi UMKM;
- b. Pendampingan koperasi, akses modal untuk koperasi;
- c. Peningkatan Kemandirian Ekonomi Desa;
- d. Peningkatan akses pasar, program inovasi dan teknologi;
- e. Fasilitasi industri kreatif, program promosi produk lokal;
- f. Pengembangan lembaga keuangan mikro, akses kredit bagi pelaku usaha;
- g. Program Pengembangan Pariwisata yang terintegrasi dan Berbasis Komunitas.
- h. Pengembangan Infrastruktur Pertanian dan Perikanan;
- i. Peningkatan Infrastruktur sarana dan prasaranan penunjang Pariwisata;
- j. Peningkatan Kualitas daya saing Tenaga Kerja dan Akses Kesempatan Kerja (Pelatihan Kerja Kompetensi, Vokasi dan pameran bursa kerja

Program Unggulan

1. Pengembangan wisata alam dan buatan berkarakter budaya Mojopahit.
2. *BBM (Beli Beli Mojokerto).*
3. Mileneal Eksport (Program pelatihan bagi pemula untuk mengeksport).
4. Mileneal Kreatif (Pembangunan Mojokerto Kreatif Hub).
5. UMKM Naik kelas
6. Peduli Pangan (Food Estate).



7. Pertanian Komunal bersama Milenial (Membangkitkan petani milenial dengan sistem pertanian komunal);
8. Perekonomian Tematik (mengadakan event setiap bulan dengan tema yang berbeda);
9. Produktivity Center (Pusat Produktivitas)
10. Optimalisasi wiaata religi
11. Pemberdayaan seni dan budaya
12. Peduli PPKS (pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)
13. Perempuan berkarya (Pemberdayaan perempuan dengan memberikan kesempatan usaha industri rumah tangga)

Sasaran Pembangunan Pemerintah Kabupaten Mojokerto pada RKPD tahun 2026 yang sangat terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto terdapat pada Misi ke-3, yaitu *“Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah”*, dengan indikator Rasio/Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah yang arah kebijakan yang kesemuanya juga bermuara pada pemerataan hasil-hasil pembangunan ke masyarakat.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan Pemerintah Kabupaten.

Secara umum, Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Kabupaten Mojokerto bisa dikatakan cukup bagus. Secara konseptual bisa dijelaskan bahwa semakin tinggi rasio kemandirian mempunyai arti bahwa tingkat ketergantungan Pemkab terhadap bantuan pemerintah pusat semakin rendah, demikian pula sebaliknya.



Memperhatikan arah kebijakan Nasional, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2026, Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 mendukung secara tidak langsung Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur maupun Kabupaten Mojokerto. Adapun Program Prioritas Perangkat Daerah yang mensupport pencapaian prioritas Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur dan Prioritas Nasional adalah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Sedangkan arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto mengacu pada Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam RKP dan RKPD Tahun 2026 adalah :

1. Optimalisasi Sumber-sumber Pendapatan

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto berupaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan melakukan identifikasi dan pemetaan potensi pajak dan retribusi yang belum tergali

2. Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak

Melalui program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya membayar pajak, serta memberikan kemudahan dalam proses pendaftaran dan pembayaran pajak

3. Inovasi Pelayanan

Pengembangan system pelayanan pajak yang lebih baik termasuk penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pajak secara online

4. Meningkatkan kualitas pengawasan dan pelaporan

Melakukan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap penerimaan pajak serta efektivitas program-program yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan pendapatan.



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Berkeadilan, Berintegritas
Harmonis, Layak, Adaptif, Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

5. Kerja Sama dan Sinergi

Membangun kerjasama dengan perangkat daerah penghasil pendapatan asli daerah, instansi lain, baik di tingkat daerah maupun provinsi, untuk meningkatkan efektivitas pengumpulan pajak dan retribusi

6. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Mengadakan dan mengikuti pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi pegawai Badan Pendapatan Daerah sesuai tugas dan fungsinya agar mampu melaksanakan tugas dengan lebih baik

7. Transparansi dan Akuntabilitas

Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pendapatan daerah untuk membangun kepercayaan masyarakat

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto

Dalam Mendukung visi dan misi Bupati Kabupaten Mojokerto, tujuan dan sasaran Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2026 mengacu kepada misi yang terkait dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan sub urusan pendapatan daerah masuk pada ***misi ke-3 yaitu “Membangun Kemandirian Ekonomi pada Semua Tingkatan, Koperasi dan Usaha Menengah (UM) serta BUMDes yang Berbasis Masyarakat guna mewujudkan keluarga yang Sejahtera”*** . Sedangkan, Tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto berdasarkan Misi ke 3 Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 3. 1

Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah

No.	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Formula Hitung	Target pada tahun 2026
1	Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	$\frac{\text{Target PAD Tahun } n - \text{Target PAD tahun } n-1}{\text{Target PAD Tahun } n-1} \times 100\%$	1,50%

Dalam rangka mencapai visi pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mojokerto telah merumuskan sasaran strategis yang terintegrasi dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk tahun 2026. Sasaran strategis ini mencerminkan komitmen Bapenda untuk tidak hanya meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga untuk memastikan pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Bapenda berusaha untuk menggali potensi sumber pendapatan yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Ini mencakup peningkatan pajak daerah, retribusi, dan sumber-sumber pendapatan lainnya dengan bersinergi secara optimal dengan perangkat daerah penghasil lainnya.

Dalam era digital, Bapenda berkomitmen untuk mengadopsi teknologi informasi dalam setiap aspek pengelolaan PAD. Penggunaan sistem informasi yang modern akan memudahkan proses pemungutan pajak dan meningkatkan transparansi. optimalisasi sumber pendapatan yang dilakukan melalui pemetaan dan identifikasi potensi baru akan memberikan



kontribusi langsung terhadap pencapaian target PAD. Dengan demikian, keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis Bapenda akan berdampak positif pada pencapaian target pendapatan, menciptakan siklus yang saling menguntungkan.

Dengan sasaran strategis Bapenda dan target PAD tahun 2026, diharapkan akan tercipta pengelolaan yang lebih baik dan lebih efektif dalam memaksimalkan potensi pendapatan daerah. Upaya ini tidak hanya akan meningkatkan PAD, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Kabupaten Mojokerto. Melalui komitmen bersama, inovasi, dan kolaborasi, Bapenda percaya bahwa target PAD yang ambisius dapat dicapai, dan pembangunan daerah akan terus berlanjut demi kesejahteraan masyarakat.

Rencana target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2026 dapat disampaikan sebagai berikut :



BerAKHLAK
BerAKHLAK Melayani - BerAKHLAK Kompeten
BerAKHLAK Loyal - BerAKHLAK Kolaborasi

**#bangga
melayani
bangsa**

Tabel 3.2
Rencana Target Pendapatan Asli Daerah
APBD Tahun 2026

NO	U R A I A N	Realisasi TA. 2024	Target PAD APBD 2025	REALISASI s.d 29 Juni 2025	%	Usulan Target Tahun 2026	Bertambah/ (Berkurang)	%
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8 = (7-4)	9 = (8/4)
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	719.708.723.154,97	823.717.225.780,00	426.268.630.295,66	51,75%	859.880.408.642,00	36.163.182.862,00	4,39%
1	BADAN PENDAPATAN DAERAH	397.123.015.084,50	504.381.315.063,00	253.761.229.990,76	50,31%	514.729.995.869,00	10.348.680.806,00	2,05%
2	DINAS KESEHATAN	46.481.536.658,36	51.195.911.149,00	22.163.294.443,16	43,29%	52.795.911.149,00	1.600.000.000,00	3,13%
3	RSUD RA. BASOENI GEDEG	61.011.278.773,87	65.000.000.000,00	29.373.702.879,88	45,19%	65.000.000.000,00	0,00	0,00%
4	RSUD PROF. DR. SOEKANDAR	167.402.734.177,15	160.000.000.000,00	86.158.947.334,94	53,85%	170.000.000.000,00	10.000.000.000,00	6,25%
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN	4.952.581.003,00	5.500.000.000,00	4.355.344.701,00	79,19%	8.000.000.000,00	2.500.000.000,00	45,45%



BerAKHLAK
BerAKHLAK
BerAKHLAK

#bangga
melayani
bangsa

NO	U R A I A N	Realisasi TA. 2024	Target PAD APBD 2025	REALISASI s.d 29 Juni 2025	%	Usulan Target Tahun 2026	Bertambah/ (Berkurang)	%
	PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN							
6	BAGIAN PEREKONOMIAN & SUMBER DAYA ALAM (SETDA)	11.207.692.993,61	11.615.222.374,00	4.405.846.200,00	37,93%	12.038.409.877,00	423.187.503,00	3,64%
7	DINAS PERTANIAN	670.795.900,00	800.002.500,00	85.072.550,00	10,63%	219.358.500,00	(580.644.000,00)	-72,58%
8	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	6.894.553.250,00	3.952.217.930,00	7.517.873.547,00	190,22%	10.000.022.407,00	6.047.804.477,00	153,02%
9	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	110.663.150,00	110.000.000,00	33.980.000,00	30,89%	115.000.000,00	5.000.000,00	4,55%
10	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	7.555.989.000,00	8.406.500.000,00	2.684.004.500,00	31,93%	8.700.000.000,00	293.500.000,00	3,49%
11	DINAS PENDIDIKAN	50.200.000,00	69.280.000,00	112.000.000,00	161,66%	75.000.000,00	5.720.000,00	8,26%
12	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2.492.405.842,53	3.167.276.764,00	965.412.924,62	30,48%	2.954.500.000,00	(212.776.764,00)	-6,72%
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4.298.388.549,00	3.247.000.000,00	2.244.273.534,00	69,12%	3.500.000.000,00	253.000.000,00	7,79%
14	DINAS TENAGA KERJA	4.063.163.600,00	3.050.000.000,00	1.957.413.000,00	64,18%	3.300.000.000,00	250.000.000,00	8,20%



BerAKHLAK
Berakhlak Melayani Kompeten
Berprestasi Loyal Berprestasi

**#bangga
melayani
bangsa**

NO	U R A I A N	Realisasi TA. 2024	Target PAD APBD 2025	REALISASI s.d 29 Juni 2025	%	Usulan Target Tahun 2026	Bertambah/ (Berkurang)	%
15	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.393.725.172,95	3.222.500.000,00	10.450.234.690,30	324,29%	8.452.210.840,00	5.229.710.840,00	162,29%



3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Sedangkan kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan penerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto dalam mengimplemetasikan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik menyusun program dan kegiatan untuk tahun 2026 serta merupakan perwujudan dari upaya untuk mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto.

Pada Tahun Anggaran 2026 Badan Pendapatan Daerah melaksanakan sebanyak 2 (dua) program dan 7 (tujuh) kegiatan dengan total pagu indikatif sebesar Rp. 33.372.409.925,00

Program, Kegiatan dan Subkegiatan Badan Pendapatan Daerah secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Mojokerto
Badan Pendapatan Daerah

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							Output	Out come					
1				2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
1				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	85,30 (A)	26.754.445.775,00	PAD		85,40 (A)	49.217.696.704,92	
			1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	90%	21.450.237.996,00	PAD		90%	36.250.902.213,24	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASD	Kab. Mojokerto	50 Orang	21.450.237.996,00	PAD		55 Orang	36.250.902.213,24	



			2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN	Kab. Mojokerto		82	167.736.000,00	PAD		83	1.276.633.520,00
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Mojokerto				PAD		1 Paket	92.950.000,00
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Kab. Mojokerto	7 Orang		50.236.000	PAD		4 Orang	670.233.520,00
				Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Kab. Mojokerto	160 Orang		17.500.000,00	PAD		160 Orang	92.950.000,00
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan	Kab. Mojokerto	60 Orang		100.000.00,00	PAD		50 Orang	360.000.000,00
				Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Mojokerto				PAD		50 Orang	60.500.000,00
			3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto		100%	2.584.140.359,00	PAD		100%	5.042.738.715,38



					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Mojokerto	3 Paket		454.422.800,00	PAD		3 Paket	820.954.139,20
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Mojokerto	2 Paket		15.799.700,00	PAD		2 Paket	86.400.000,00
					Pengadaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Mojokerto	96 Paket		693.301.200,00	PAD		96 Paket	1.535.240.785,00
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Mojokerto	2 Paket		747.435.200,00	PAD		2Paket	1.263.165.488,00
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Mojokerto	12 Dokumen		163.414.400,00	PAD		12 Dokumen	374.808.876,00
					Penyediaan Bahan Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Mojokerto	2 Paket		309.635.500,00	PAD		2 Paket	560.499.299,00
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Mojokerto	12 Laporan		22.433.250,00	PAD		12 Laporan	54.812.192,50
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Mojokerto	12 Laporan		177.698.309,00	PAD		12 Laporan	346.857.935,58



				4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kab. Mojokerto		100%	269.081.200,00	PAD		100%	2.512.336.564,00
					Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Mojokerto	1 Unit			PAD		1 Unit	551.250.000,00
					Pengadaan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Mojokerto	4 Unit		158.410.000,00	PAD		12 Unit	963.352.236,00
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel	Kab. Mojokerto	1 Paket		110.671.200,00	PAD		2 Paket	187.034.328,00
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Mojokerto				PAD		1 Unit	84.700.000,00
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Mojokerto				PAD		1 Unit	605.000.000,00
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Mojokerto				PAD		1 Unit	90.750.000,00
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Mojokerto				PAD		1 Unit	30.250.000,00



				5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kab. Mojokerto		100%	916.272.960,00	PAD		100%	1.548.515.498,40
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Mojokerto	12 Laporan		639.801.600,00	PAD		12 Laporan	1.081.278.900,00
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Mojokerto	12 Laporan		276.471.360,00	PAD		12 Laporan	467.236.598,40
				6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Kab. Mojokerto		100%	1.366.977.260,00	PAD		100%	2.586.570.193,00
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Perorangan atau Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas OPerorangan atau Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Mojokerto	2 Unit			PAD		2 Unit	121.000.000,00



				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Mojokerto	102 Unit		637.370.200,00	PAD		102 Unit	992.714.281,00
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Mojokerto	10 Unit			PAD		10 Unit	60.500.000,00
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Mojokerto	200 Unit		128.761.900,00	PAD		215 Unit	159.477.948,50
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Mojokerto	2 Unit Gedung 8 Baliho		600.845.160,00	PAD		1 Unit Gedung 8 Baliho	1.262.552.964,40
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Mojokerto				PAD		9 Unit	99.225.000,00
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Pendukung Sarana dan Prasarna Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Mojokerto				PAD		1 Unit	11.000.000,00
2				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Porsentase Realisasi Penerimaan PAD 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 3. Jumlah Inovasi yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi serta Berkelanjutan	Kab. Mojokerto		1. 100 % 2. 87 3. 1 Inovasi	6.617.964.150,00	PAD	1. 100% 2. 88 3. 1 Inovasi	100%	11.397.839.755,90



				7	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Porsentase Basis Data Pajak Daerah yang Akurat	Kab. Mojokerto		65%	6.617.964.150,00	PAD		65%	9.046.253.004,00
						2. Porsentase Peningkatan Potensi PAD	Kab. Mojokerto		3%		PAD		3%	
				1		3. Porsentase Regulasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Sesuai	Kab. Mojokerto		100%		PAD		100%	
						4. Porsentase Sarana dan Prasarana Pajak Daerah yang Layak Fungsi dan Memadai	Kab. Mojokerto		80%		PAD		80%	
						5. Porsentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Daerah	Kab. Mojokerto		75%		PAD		75%	
						6. Porsentase Realisasi Tunggakan Pajak Daerah	Kab. Mojokerto		50%		PAD		50%	
						7. Porsentase OPD Penghasil yang Melaksanakan Hasil Komitmen (Target)	Kab. Mojokerto		65%		PAD		65%	
						8. Porsentase Sistem Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Berbasis Online	Kab. Mojokerto		80%		PAD		80%	



					1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Mojokerto	2 Dokumen			PAD		2 Dokumen	35.750.000,00
					2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Mojokerto	2 Dokumen		127.120.000,00	PAD		2 Dokumen	313.413.711,00
					3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Mojokerto	2 Unit		431.495.000,00	PAD		2 Unit	741.879.914,00
					4	Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah, Subyek Pajak Daerah dan Wajib Pajak Daerah	Kab. Mojokerto	4 Laporan		797.956.300,00	PAD		4 Laporan	1.577.741.412,00
					5	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Jumlah Obyek Pajak yang Disesuaikan NJOPnya	Kab. Mojokerto	12.000 OP		307.206.000,00	PAD		12.000 OP	568.228.700,00



M	M	M			6	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab. Mojokerto	11.250 Layanan	323.000.000,00	PAD		11.250 Layanan	568.228.700,00
					7	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Kab. Mojokerto	243 Dokumen	41.000.000,00	PAD		243 Dokumen	108.160.000,00
					8	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penagihan Pajak Daerah	Kab. Mojokerto	4 Dokumen	2.550.495.750,00	PAD		4 Dokumen	4.452.720.317,50
					9	Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Mojokerto	145 Dokumen	175.385.000,00	PAD		145 Dokumen	289.550.911,00
					10	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Mojokerto	2 Laporan	1.681.983.400,00			2 Laporan	2.382.581.276,40
					10	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kab. Mojokerto	12 Laporan	182.322.700,00			12 Laporan	289.550.911,00
					11	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Mojokerto	7 Laporan	0,00			7 Laporan	0,00
						JUMLAH				33.372.409.925,00				60.615.536.460,82



BerAKHLAK
Berakhlak, Berprestasi, Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan
Harmonis, Layak, Adaptif, Kolaborasi

**#bangga
melayani
bangsa**

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Setelah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) maka disusunlah Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2026. Renja disusun untuk memudahkan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2026. Renja ini dibuat sebagai implementasi dari tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2026.

Pendanaan program dan kegiatan didasarkan pada program dan kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Merealisasikan perencanaan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Tahun 2026 dan perkiraan Tahun 2027, maka ditetapkan anggaran untuk mendanai program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Indikator kerja dan sasaran kerja yang dijabarkan dalam pencapaian Renstra Badan Pendapatan Daerah berdasarkan pagu indikatif.

Berikut merupakan tabel yang menggambarkan rencana kerja dan pendanaan Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2026 dan telah dijabarkan pula ke dalam target dan pagu indikatif per triwulan:



Tabel 4. 1
Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Pendapatan Daerah
Tahun 2026

Kode Rekening			Urusan Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Rencana Kerja 2026					
SKPD			Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
1		2		3	4	5	6	7	8
Badan Pendapatan Daerah	5.02.01		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	85,30	26.754.445.775,00	PAD	
		5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	90%	21.450.237.996,00	PAD	
		5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Mojokerto	50 Orang/ Bulan	21.450.237.996,00	PAD	
		5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Indeks Profesionalitas ASN	Kab. Mojokerto	80	448.150.700,00	PAD	
		5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Mojokerto	1 Paket		PAD	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Kab. Mojokerto	7 Orang	50.236.000,00	PAD	



			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Mojokerto	160 Orang	17.500.000,00	PAD	
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Mojokerto	60 Orang	100.000.000,00	PAD	
			Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Mojokerto	4 Dokumen		PAD	
		5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	100%	2.584.140.359,00	PAD	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Mojokerto	3 Paket	454.422.800,00	PAD	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Mojokerto	2 Paket	15.799.700,00	PAD	
			Pengadaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Mojokerto	96 Paket	693.301.200,00	PAD	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Mojokerto	2 Paket	747.435.200,00	PAD	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	Kab.	12 Doku men	163.414.400,00	PAD	



			Peraturan Perundang-Undangan	Perundang-Undangan yang Disediakan	Mojokerto				
			Penyediaan Bahan Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Mojokerto	2 Paket	309.635.500,00	PAD	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Mojokerto	12 Laporan	22.433.250,00	PAD	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Mojokerto	12 Laporan	177.698.309,00	PAD	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kab. Mojokerto	100%	269.081.200,00	PAD	
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Mojokerto			PAD	
			Pengadaan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Mojokerto	4 Unit	158.410.000,00	PAD	
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel	Kab. Mojokerto	2 Paket	110.671.200,00	PAD	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Mojokerto			PAD	
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Mojokerto			PAD	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Mojokerto			PAD	



			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Mojokerto			PAD	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kab. Mojokerto	100%	916.272.960,00	PAD	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Mojokerto	12 Laporan	639.801.600,00	PAD	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Mojokerto	12 Laporan	276.471.360,00	PAD	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Kab. Mojokerto	100%	1.366.977.260,00	PAD	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Mojokerto	2 Unit		PAD	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan	Kab. Mojokerto	102 Unit	637.370.200,00	PAD	



			Pemeliharaan Mebel	Perizinannya Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Mojokerto	10 Unit		PAD	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Mojokerto	200 Unit	128.761.900,00	PAD	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Mojokerto	1 Unit 8 Baliho	600.845.160,00	PAD	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarna dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Mojokerto	9 Unit		PAD	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarna dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Mojokerto	1 Unit		PAD	
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Persentase Realisasi Penerimaan PAD 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 3. Jumlah Inovasi yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi serta Berkelanjutan	Kab. Mojokerto	1. 100% 2. 87 3. 1	6.617.964.150,00	PAD	
			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan	1. Persentase Basis Data Pajak Daerah	Kab.	65%	6.617.964.150,00	PAD	



			Daerah	yang Akurat	Mojokerto				
				2. Persentase Peningkatan Potensi PAD	Kab. Mojokerto	3%		PAD	
				3. Persentase Regulasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Sesuai	Kab. Mojokerto	100%		PAD	
				4. Persentase Sarana dan Prasarana Pajak Daerah yang Layak Fungsi dan Memadai	Kab. Mojokerto	80%		PAD	
				5. Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Daerah	Kab. Mojokerto	75%		PAD	
				6. Persentase Realisasi Tunggakan Pajak Daerah	Kab. Mojokerto	50%		PAD	
				7. Persentase OPD Penghasil yang Melaksanakan Hasil Komitmen (Target)	Kab. Mojokerto	65%		PAD	
				8. Persentase Sistem Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Berbasis Online	Kab. Mojokerto	80%		PAD	
			Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Mojokerto	2 Dokumen		PAD	
			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah dokumen Hasil Analisa dan Pengembangan Pajak	Kab. Mojokerto	3 Dokumen	127.120.000,00	PAD	



				Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah					
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Mojokerto	1 Unit	431.495.000,00	PAD	
			Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah, Subyek Pajak Daerah dan Wajib Pajak Daerah	Kab. Mojokerto	12 Laporan	797.956.300,00	PAD	
			Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Ha atas Tanah dan Bangunan	Jumlah Obyek Pajak yang Disesuaikan NJOPnya	Kab. Mojokerto	12.000 OP	307.206.000,00	PAD	
			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab. Mojokerto	11.250 Layanan	323.000.000,00	PAD	
			Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Kab. Mojokerto	243 Dokumen	41.000.000,00	PAD	
			Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penagihan Pajak Daerah	Kab. Mojokerto	4 Dokumen	2.550.495.750,00	PAD	
			Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Mojokerto	145 Dokumen	175.385.000,00	PAD	
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Mojokerto	2 Laporan	1.681.983.400,00	PAD	



			Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kab. Mojokerto	12 Laporan	182.322.700,00	PAD	
				JUMLAH			33.372.409.925,00		



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan OPD tahunan yang memuat kebijakan dan program/kegiatan/subkegiatan dalam satu tahun anggaran dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah. Di samping itu *Renja* juga berfungsi untuk meninjau kembali hasil capaian kinerja Perangkat Daerah di tahun sebelumnya. *Rencana Kerja* Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 ini disusun berdasarkan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026 dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto tahun 2026.

Penyusunan *Rencana Kerja* Badan Pendapatan Daerah Tahun 2026 sebagai upaya mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto. Pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis, baik dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Mojokerto maupun di Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Komitmen dan dukungan dari seluruh ASN di lingkungan Badan Pendapatan Daerah sangat dibutuhkan dalam rangka menjamin terlaksananya rencana program dan kegiatan yang disusun di dalam *Rencana Kerja* Tahun 2026 ini serta dapat mejadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan peningkatan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, 23 Juni 2025

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO

Drs. ARDI SEPDIANTO, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19700927 1991011 002

